

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam sektor keuangan global. Bank yang mematuhi syariah memainkan peran penting dalam inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi global. Sektor perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset yang kuat, dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum inovasi keuangan bercabang menjadi dua kategori. Yang pertama melibatkan penciptaan instrumen yang sepenuhnya sesuai dengan syariah, sedangkan yang kedua mencakup adaptasi inovasi keuangan barat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memungkinkan adanya fleksibilitas penafsiran. Islam membolehkan inovasi asalkan menganut prinsip syariah menekankan kepentingan inovasi dan fokus utamanya pada komitmen organisasi terhadap keberlanjutan.¹

Kinerja keberlanjutan perusahaan telah mengalami perdebatan selama beberapa tahun terakhir. Studi yang menilai dan menjaga keberlanjutan telah meningkat di seluruh dunia. Keberlanjutan perusahaan diukur menggunakan tiga perspektif yaitu manfaat ekonomi, pengurangan dampak lingkungan dan manfaat sosial kesejahteraan. Ketiga aspek

¹ Rita Wijayanti and Doddy Setiawan, "The Role of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board on Sustainability Reports," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 3 (2023): 100083, <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>.

keberlanjutan ini disebut sebagai *Triple Bottom Line* (TBL). Dalam hal ini, inisiatif perbankan berkelanjutan menjadi lebih menonjol. Sektor perbankan mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena keamanan dan pelestariannya menghasilkan banyak potensi manfaat bagi masyarakat. Entitas keuangan yang berfungsi dengan baik termasuk bank dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang dan kesejahteraan sosial dengan mendorong dunia usaha untuk mengadopsi kebijakan berkelanjutan dalam operasinya.²

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG merupakan salah satu model *Good Corporate Governance* (GCG) yang mempunyai struktur dan proses tata kelola yang melindungi hak dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang taat pada aturan syariah. Dalam menerapkan strategi bisnis ini, yang telah direncanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, penting bagi perusahaan untuk memiliki tata kelola yang baik.³

Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang efisien dan berkelanjutan di semua sektor perusahaan termasuk bank syariah dan

² Ahmad Ali Jan, Fong Woon Lai, and Muhammad Tahir, "Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial Institutions," *Journal of Cleaner Production* 315, no. March 2020 (2021): 128099, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>.

³ Ida Puspitarini Wahyuningtyas and Dwi Lutfiana, "The Effect Of Islamic Corporate Governance, Islamic Corporate Social Responsibility, And Islamicity Performance Index On The Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia," *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2022): 135–56, <https://doi.org/10.24042/al-mal.v3i2.12096>.

industri jasa keuangan islam. Dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan konsisten mengacu pada prinsip syariah, bank syariah diharapkan menerapkan prinsip GCG yang merujuk pada ketentuan syariah. Maka dari itu, konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) menjadi sangat penting untuk menjaga citra baik perbankan syariah di mata masyarakat.

Selain itu, struktur kepemilikan juga memainkan peran penting dalam efektivitas penerapan tata kelola. kepemilikan institusional sebagai bentuk dominasi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan atau institusi profesional, diyakini mampu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap manajemen untuk menjalankan praktik-praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemilik institusional sering kali memiliki kepentingan jangka panjang yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat menjadi variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara *islamic corporate governance* dan kinerja keberlanjutan.

Bank syariah membangun sistem pengendalian manajemen keberlanjutan dan memperkenalkan kriteria keberlanjutan ke dalam strategi bisnis untuk mengatasi tekanan eksternal dari otoritas regulasi dan kelompok masyarakat sipil yang menyerukan bank syariah untuk menunjukkan komitmen pengelolaan yang lebih besar terhadap kesejahteraan sosial nasabahnya dan dampak lingkungan. Selain itu, peraturan baru-baru ini telah mengamanatkan penciptaan tata kelola yang

inklusif dan kerangka kerja yang mengatur dirinya sendiri agar dapat memasukkan kriteria keberlanjutan sosial dan lingkungan ke dalam orientasi strategi bank syariah dengan lebih baik.⁴

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep pembangunan yang tidak hanya mementingkan generasi sekarang saja, namun jauh ke depan. Konsep inilah yang mendorong munculnya konsep manajemen keberlanjutan pada suatu industri/perbankan. Pada tahun 1987 konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pertama pengambilan kebijakan internasional dengan diterbitkannya Laporan Brundtland. Keberlanjutan pada sektor bisnis merupakan proses pengelolaan risiko ekonomi, lingkungan dan sosial yang dilakukan suatu perusahaan. Pengelolaan keberlanjutan memerlukan kerangka pengelolaan yang baik, pertama menghubungkan pengelolaan lingkungan dan sosial dengan bisnis, kedua mengintegrasikan informasi sosial lingkungan dengan informasi bisnis ekonomi dan laporan keberlanjutan.⁵

⁴ Aghilasse Kashi et al., "Do Institutional Environment and Corporate Governance Structures Determine Islamic Banks' Sustainability Performance? Evidence across Key Jurisdictions in Islamic Finance Industry," *Borsa Istanbul Review*, no. November 2023 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.06.005>.

⁵ Arini Arini, Satia Nur Maharani, and Dodik Juliardi, "The Impact of The Sustainability Report on The Performance of Maqashid Sharia Islamic Commercial Banks in Indonesia," *International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific* 3, no. 3 (2020): 96–103, <https://doi.org/10.32535/ijthap.v3i3.958>.

Tabel 1.1**Kinerja Berkelanjutan Pada Bank Umum Syariah****Periode 2024**

No	Nama BUS	Kinerja Berkelanjutan
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	1. Aspek ekonomi, pembiayaan pada 18 sektor usaha ekonomi sebesar Rp.16.764.000.000 2. Aspek lingkungan, total konsumsi listrik sebesar 5.359.208 kwh 3. Aspek sosial, total invetasi sosial yang direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program CSR Pengembangan Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp.7.938.000.000
2	PT. Bank Mega Syariah	1. Aspek ekonomi, bank melakukan penyaluran pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp.7,76 triliun 2. Aspek lingkungan, volume penggunaan listrik kantor pusat tercatat sebesar 258.335 kwh 3. Aspek sosial, total penyaluran dana kegiatan CSR sebesar Rp.9.031.485.488
3	PT. Bank BCA Syariah	1. Aspek ekonomi, penyaluran pembiayaan kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) Rp.2.828,5 miliar

		2. Aspek lingkungan, intensitas penggunaan energi listrik sebesar 1.612.618,5 kwh 3. Aspek sosial, bank mengalokasikan dana kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp.930 juta
4	PT. Bank BTPN Syariah	1. Aspek ekonomi, dari pencapaian pembiayaan sebesar Rp.10,17 triliun sebesar 94,5% merupakan pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan 2. Aspek lingkungan, bank mencatat intensitas energi listrik 3.271.510 kwh per tahun 3. Aspek sosial, Melalui Program Daya dan Bestee Tepat Bank terus mendampingi sesama di berbagai pelosok negeri
5	PT. Bank Victoria Syariah	1. Aspek ekonomi, pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.50.522.000.000, sebesar 3,56% pembiayaan berkelanjutan 2. Aspek lingkungan, total penggunaan listrik sebesar 154.754 kwh 3. Aspek sosial, penyaluran dana sosial terkait keuangan berkelanjutan sebesar Rp.10.000.000.000
6	PT. Bank Panin	1. Aspek ekonomi, pembiayaan yang disalurkan

	Dubai Syariah	kepada pihak ketiga mengalami peningkatan 1,77% sebesar Rp.11,82 triliun 2. Aspek lingkungan, penggunaan energi listrik sebesar Rp.1.311.000.000 3. Aspek sosial, dana CSR telah disalurkan oleh bank sebesar Rp.4.038.678.579 yang bersumber dari Zakat Korporasi dan Anggaran CSR bank
7	PT. Bank KB Bukopin Syariah	1. Aspek ekonomi, total pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan Rp.2,06 triliun 2. Aspek lingkungan, penggunaan energi listrik sebesar 1.327.856 kwh 3. Aspek sosial, realisasi biaya CSR sebesar Rp.880.928.111
8	PT. Bank Syariah Indonesia	1. Aspek ekonomi, pada kinerja keuangan berkelanjutan bank telah memberikan pembiayaan sebesar Rp.66,4 triliun pada kegiatan usaha berkelanjutan 2. Aspek lingkungan, pemakaian energi listrik sebesar 80.779.932 kwh 3. Aspek sosial, realisasi penyaluran dana TJSL berdasarkan kategori program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dakwah

		advokasi, dan amil sebesar Rp.305.573.338.730
9	PT. Bank Aceh Syariah	1. Aspek ekonomi, total pembiayaan bank sebesar 20.404.330.000.000 2. Aspek lingkungan, penggunaan energi listrik 41.680 kwh dengan pengeluaran biaya listrik sebesar Rp.864.000.000 3. Aspek sosial, total penyaluran dana CSR bank sebesar Rp.609.800.00
10	PT. Bank Jabar Banten Syariah	1. Aspek ekonomi, bank telah berhasil mencapai target untuk penyaluran pembiayaan sebesar Rp.9,8 triliun dengan pencapaian realisasi terhadap target sebesar 98,93% 2. Aspek lingkungan, intensitas pemakaian energi listrik sebesar 834.979,39 kwh. 3. Aspek sosial, bank secara konsisten menjalankan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setiap tahunnya, penyaluran dana CSR sebesar Rp.1.809.062.120
11	PT. Bank Aladin Syariah	1. Aspek ekonomi, nilai <i>outstanding</i> produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan dalam penyaluran dana sebesar Rp.3.085.210.000

		2. Aspek lingkungan, volume penggunaan listrik sebesar 100.509 kwh 3. Aspek sosial, bank telah merealisasikan biaya untuk program CSR sebesar Rp.496.300.000
--	--	--

Sumber: Laporan Berkelanjutan Bank Umum Syariah Periode 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data kinerja berkelanjutan Bank Umum Syariah periode 2024. Dilihat dari aspek ekonomi, bank yang melakukan penyaluran pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan paling banyak adalah Bank Syariah Indonesia sebesar Rp.66,4 triliun, sedangkan bank yang paling sedikit adalah Bank BCA Syariah sebesar Rp.2.828,5 miliar. Pada aspek lingkungan, bank melakukan penghematan listrik, bank yang paling banyak menggunakan energi listrik adalah Bank Syariah Indonesia yaitu sebesar 80.779.932 kwh, sedangkan penggunaan yang paling sedikit adalah Bank Aceh Syariah sebesar 41.680 kwh Selanjutnya pada aspek sosial, total investasi sosial yang direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program CSR yang paling banyak adalah Bank Syariah Indonesia sebesar Rp.305.573.338.730, sedangkan yang paling sedikit adalah Bank Aladin Syariah sebesar Rp.496.300.000.

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Jan, dkk dengan hasil yang menunjukkan mekanisme ICG yang paling berpengaruh dari perspektif teoritis teori keagenan, teori institusional, dan teori legitimasi

dan membangun hubungannya dengan kinerja keberlanjutan.⁶ Penelitian Ahmad Ali Jan, dkk sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Corinne Post, dkk dengan hasil yang menunjukkan bahwa aspek komposisi dewan berhubungan positif dengan kekuatan Kinder Lydenberg Donimi (KLD). KLD adalah perusahaan yang melakukan riset sosial terhadap perusahaan di Amerika Serikat.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Jan, dkk dan Corinne Post, dkk bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamoi Jangu, dkk dan Rita Wijayanti, dkk. Penelitian yang dilakukan Tamoi Jangu, dkk dengan hasil yang menunjukkan bahwa ukuran dewan, profesionalisme dan penunjukan dewan memiliki dampak signifikan pada pengungkapan keberlanjutan. Namun, independensi dewan dan kepemilikan dewan tidak signifikan dalam memotivasi pengungkapan keberlanjutan.⁸ Penelitian Tamoi Jangu, dkk sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Wijayanti, dkk dengan hasil yang mengungkapkan bahwa karakteristik dewan tertentu seperti ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, ukuran DPS dan lintas keanggotaan di DPS, mempunyai pengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan.

⁶ Jan, Lai, and Tahir, "Developing an Islamic Corporate Governance Framework to Examine Sustainability Performance in Islamic Banks and Financial Institutions," 2021.

⁷ Corinne Post, Noushi Rahman, and Emily Rubow, *Green Governance: Boards of Directors' Composition and Environmental Corporate Social Responsibility* (New York, 2011), <https://doi.org/10.1177/0007650310394642>.

⁸ Tamoi Jangu et al., "Does Good Corporate Governance Lead to Better Sustainability Reporting? An Analysis Using Structural Equation Modeling," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 145 (2014): 138–45, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.020>.

Selain itu, rapat dewan direksi ditemukan berdampak negatif terhadap pelaporan keberlanjutan.⁹

Dengan perbedaan penelitian, kondisi atau keadaan, subjek, tempat serta perbedaan tahun dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi serta gambaran yang lebih luas terkait kinerja keberlanjutan Bank Umum Syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mengembangkan Kerangka *Islamic Corporate Governance* untuk Mengkaji Kinerja Keberlanjutan pada Bank Umum Syariah Tahun 2021-2024 dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah independensi dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan?
2. Apakah proses dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan?
3. Apakah kompetensi dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan?

⁹ Wijayanti and Setiawan, “The Role of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board on Sustainability Reports.”

4. Apakah kepemilikan institusi dapat memoderasi hubungan antara *islamic corporate governance* terhadap kinerja keberlanjutan?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini pada tiga variabel yaitu yang pertama *islamic corporate governance* menggunakan independensi dewan pengawas syariah, proses dewan pengawas syariah, dan kompetensi dewan pengawas syariah. Yang kedua kepemilikan institusional dan yang ketiga kinerja keberlanjutan.
2. Bank umum syariah yang mencantumkan laporan keuangan dan laporan berkelanjutan periode 2021-2024.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh independensi dewan pengawas syariah terhadap kinerja keberlanjutan
2. Mengetahui pengaruh proses dewan pengawas syariah terhadap kinerja keberlanjutan
3. Mengetahui pengaruh kompetensi dewan pengawas syariah terhadap kinerja keberlanjutan
4. Mengetahui efek moderasi kepemilikan institusional pada pengaruh *islamic corporate governance* terhadap kinerja keberlanjutan

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu referensi mengenai mengembangkan kerangka *islamic corporate governance* terhadap kinerja keberlanjutan bank umum syariah dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi bagi akademisi di masa sekarang ataupun di masa depan. Dan juga sebagai pengisi keterbatasan penelitian sebelumnya serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks tata kelola dan keberlanjutan di sektor keuangan syariah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi para praktisi dalam melengkapi kebutuhan serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai *islamic corporate governance* terhadap kinerja keberlanjutan pada bank umum syariah dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan proposal ini, maka dibuatlah sistematika penulisan proposal yang terdiri atas 5 bab, di mana masing-masing bab terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi teori terkait teori keagenan, teori institusional dan teori legitimasi, *islamic corporate governance*, kepemilikan institusional, kinerja keberlanjutan, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan rumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi dari penulis sebagai penutup